



LKIP 2021

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Website :
www.bpsdm.sulselprov.go.id



KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah tahun 2021 dan sekaligus dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan yaitu Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya yang harapannya dapat dimanfaatkan untuk :

- (1) Bahan evaluasi kinerja
- (2) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang
- (3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang,
- (4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 disusun dalam kerangka akuntabilitas Instansi Pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat

pendorong terwujudnya GOOD GOVERNANCE, dan dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik serta bagian dari REFORMASI BIROKRASI pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Semoga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sulawesi Selatan

Drs. H. ASRI SAHRUN SAID

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19671203 199403 1 00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I.....	9
PENDAHULUAN	9
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	9
B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN	18
C. SUMBERDAYA MANUSIA	20
D. SARANA DAN PRASARANA.....	22
BAB II.....	25
PERENCANAAN KINERJA	25
A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2018 - 2023	25
1. VISI DAN MISI	25
2. NILAI - NILAI ORGANISASI	27
3. TUJUAN.....	27
4. SASARAN.....	28
5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	29
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	30
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN	31
D. PERJANJIAN KINERJA.....	32
BAB III.....	34
AKUNTABILITAS KINERJA.....	34

A.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	
A.1	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS	34
A.2	CAPAIAN KINERJA ATAS IKU	35
A.3	EVALUASI KINERJA ATAS TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	45
A.4	ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN	59
B.	REALISASI ANGGARAN	62
BAB V		70
PENUTUP		72

BAB I

PENDAHULUAN

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkedudukan sebagai : ***“Unsur pendukung tugas kepala daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”.***

A. Tugas Pokok

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

B. Fungsi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi Perencanaan dan Pelatihan, Pengembangan dan Inovasi Kediklatan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional serta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur;

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan meliputi bidang Perencanaan dan Pelatihan, Pengembangan dan Inovasi Kediklatan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional serta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur;
- 2) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi Perencanaan dan Pelatihan, Pengembangan dan Inovasi Kediklatan,

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional serta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur;

- 3) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas:

- (1) Kepala Badan;
- (2) Sekretariat;
- (3) Bidang;
- (4) Sub Bagian;
- (5) Sub Bidang;
- (6) Jabatan Fungsional;

Berikut uraian lebih lanjut tentang kelengkapan dari masing-masing komponen struktur organisasi :

1. Sekretariat

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
- c. Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang

Bidang terdiri atas :

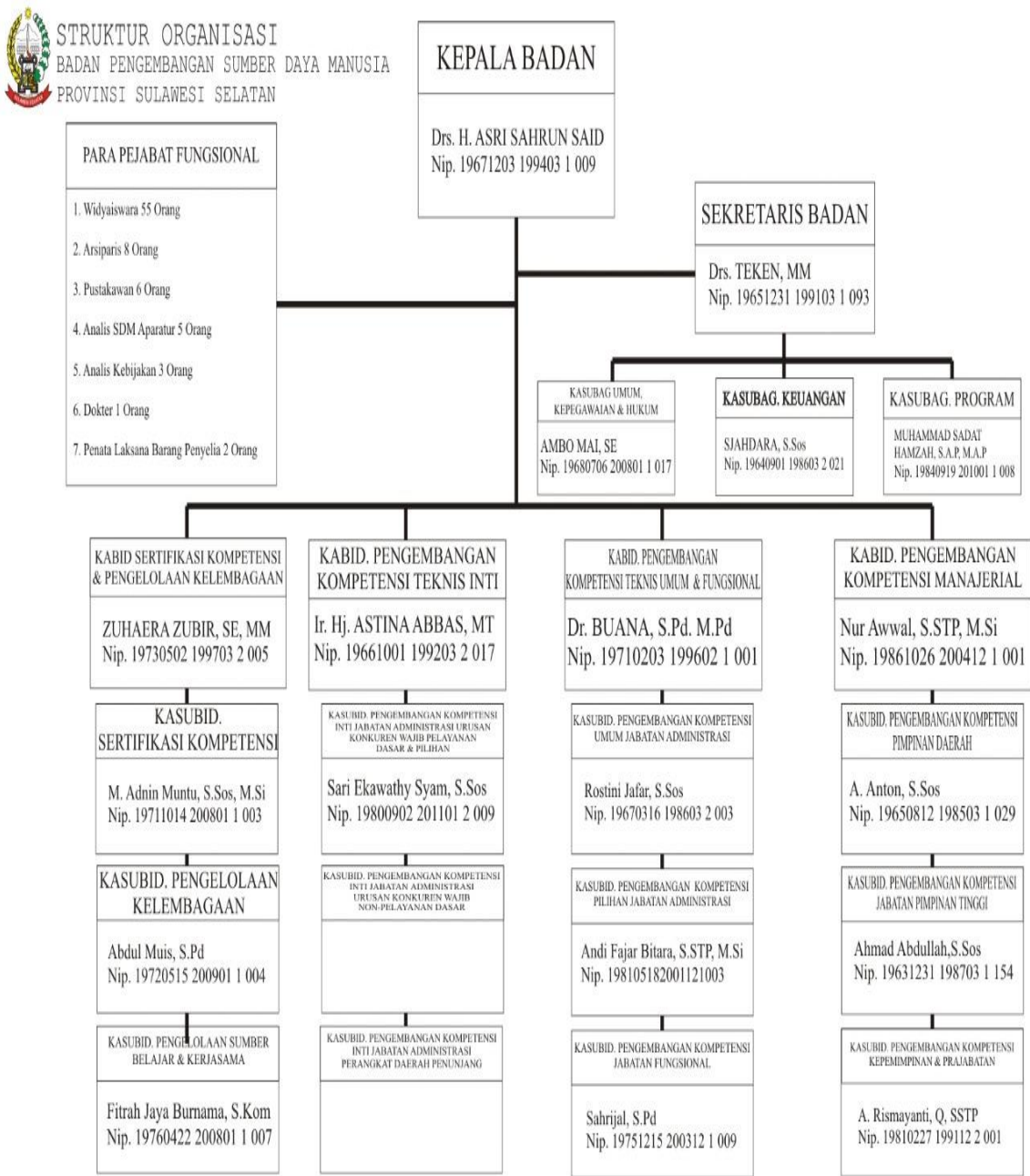
- a. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;
- b. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti;
- c. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum & Fungsional;
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial

Setiap Bidang terdiri atas :

- 1) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah;
- b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi;
- c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan & Prajabatan;
- 2) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum & Fungsional, terdiri atas:
 - a) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi;
 - c) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
- 3) Bidang Sertifikasi Kompetensi & Pengelolaan Kelembagaan, terdiri atas:
 - a) Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi;
 - b) Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan;
 - c) Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar & Kerjasama;
- 4) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti, terdiri atas:
 - a) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan konkuren wajib Pelayanan dasar & pilihan;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non-Pelayanan Dasar; dan
 - c) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang
- 5) Jabatan Fungsional, terdiri atas:
 - a) Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
 - b) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Badan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun struktur Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya Manusia Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan

Guna menjamin pemenuhan tingkat kompetensi aparatur yang tersertifikasi baik dari sisi manajemen kediklatan maupun desain pembelajaran, maka Badan Pengembangan SDM Prov. Sulawesi Selatan telah memiliki pengakuan atau akreditasi dari Instansi Pembina Diklat (LAN – RI). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAN-RI No. 713/K.1/PDP.09/2018 tanggal 19 November 2018 maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulawesi Selatan telah terakreditasi untuk melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan Administrasi dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas selain itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Lembaga Serifikasi Penyelenggaraan (LSP) Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah memiliki Unit Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN).

Sejak tahun 2009, BPSDM telah menerapkan sistem manajemen mutu (SMM) berdasarkan ISO 9001:2015 dengan demikian, Badan Pengembangan SDM Prov. Sul - Sel sebagai institusi penyelenggara diklat Aparatur/PNS berhak memfasilitasi penyelenggara diklat terutama untuk Pemerintah Kab./Kota se Sulawesi Selatan yang institusi penyelenggara diklatnya belum terakreditasi. Dengan status ini hampir semua penyelenggaraan diklat di lingkup Pemerintah Kab./Kota se Sulawesi Selatan telah difasilitasi oleh Badan Pengembangan SDM Prov. Sul - Sel. Status lembaga terakreditasi ini juga bahkan telah berdampak pada semakin banyaknya jumlah pihak atau mitra kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi SDM terutama pendidikan dan pelatihan.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara menyeluruh. agar dapat terciptanya BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai organisasi yang baik, maka kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya perlu dirancang sesuai

dengan kebutuhan.

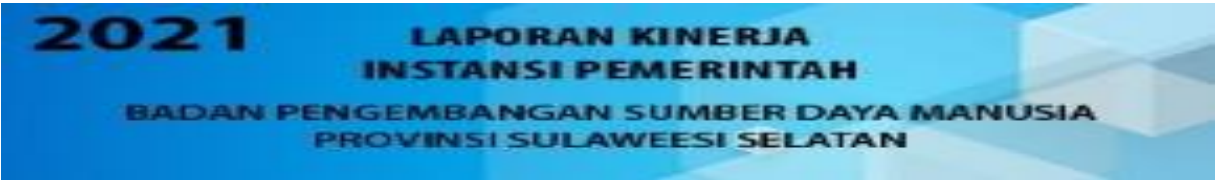
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Juni 2020, jumlah ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 139 (seratus tiga puluh Sembilan) orang.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas adalah : 1 (satu) orang Eselon II; 5 (lima) orang Eselon III yang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang; serta 15 orang Eselon IV yang terdiri 3 (tiga) orang kasubbag dan 12 orang kasubid. Selain itu BPSDM juga didukung oleh 81 (delapan puluh satu) tenaga fungsional yang terdiri dari 55 (Lima puluh lima) orang fungsional Widyaaiswara, Fungsional Arsiparis sebanyak 8 (Delapan) Orang, 6 (enam) orang fungsional pustakawan, 3 (tiga) orang fungsional Analis Kebijakan, fungsional Analis SDM Aparatur 5 (Lima) orang, 2 (dua) orang Fungsional Penata Laksana Barang Penyedia dan 1 (satu) orang Fungsional dokter.

**Tabel 2.1. Jumlah Pejabat Struktural Badan Pengembangan SDM
Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021**

No.	KETERANGAN	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	2	5
3	Eselon IV	9	4	13
	Total	13	6	19

Sumber data : Bagian Umum & Kepeg. BPSDM Prov.Sulsel TA. 2021



Jumlah Pejabat Struktural Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Golongan Tahun 2021

NO	KETERANGAN	Eselon			Jumlah
		II	III	IV	
1	Golongan IV	1	5	2	8
2	Golongan III	-	-	11	11
3	Golongan II	-	-	-	-
4	Golongan I	-	-	-	-
	Total	1	5	13	19

Sumber data : Bagian Umum & Kepeg. BPSDM Prov.Sulsel TA.2021

Jumlah Pegawai Fungsional Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan
berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No.	KETERANGAN	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Fungsional Widyaiswara Ahli Utama	10	5	15
2	Fungsional Widyaiswara Ahli Madya	27	6	33
3	Fungsional Widyaiswara Muda	3	5	7
	Fungsional Arsiparis Ahli Madya	1	1	2
4	Fungsional Arsiparis Ahli Muda	3	2	5
5	Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	1	-	1
6	Fungsional Pustakawan Ahli Madya	1	3	4
7	Fungsional Pustakawan Ahli Muda	1	1	2
8	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya	1	-	1
9	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	-	2	2
10	Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Muda	-	3	3
	Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	-	2	2
	Fungsional Penata Laksana Barang Penyedia	2	-	2
11	Fungsional Dokter	1	-	1
	Total	51	30	81

Sumber data: Bagian Umum & Kepeg. BPSDM Prov. Sulsel TA.2021

Gambaran Umum Pegawai berdasarkan Pendidikan formal yang ditamatkan pada Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOLONGAN I				JMLH	GOLONGAN II				JMLH	GOLONGAN III				JMLH	GOLONGAN IV					JMLH	JUMLAH KESELURUHAN																			
		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	E																					
		L	P	L	P		L	P	L	P		L	P	L	P		L	P	L	P	L	P	L	P																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																			
1	SD					0	0				0	0				0	0					0	0	0	0																	
2	SLTP					0	0				0	0				0	0					0	0	0	0																	
3	SLTA					0	0	1	1	2	4	3				0	0					0	0	4	3																	
4	SARJANA MUDA / AKADEMIK D III					0	0				1	0	1	1	1	3	4	1				0	0	4	2																	
5	SARJANA 1 (S1)					0	0			1	1	0	5	3	2	1	2	7	9	10	18	21	1	1	1	1	1	2	2	21	23											
6	SARJANA 2 (S2)					0	0				0	0		1	2	3	2	4	2	8	6	8	5	6	4	6	1	8	28	10	36	16										
7	SARJANA 3 (S3)					0	0				0	0					2	3	2	3	2	2	8	1	4	2		5	16	8	18	11										
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	3	1	5	4	6	3	3	4	8	9	15	15	32	31	11	8	14	6	10	1	11	0	0	5	46	20	83	55
																																							138			

Sumber data : Bagian Umum & Kepeg. BPSDM Prov.Sulsel TA. 2021

Gambaran Umum Pegawai berdasarkan Usia pada Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No.	Unit Kerja	Usia (Tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1.	Sekretariat		1	1	4	6	3	6	21
2.	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial		1	3	3		1	3	11
3.	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional		1		1	2		5	9
4.	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan			1	1	2	4		8
5.	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti				2	3	1	2	8
6.	Widyaiswara				1	5	14	36	56
7.	Arsiparis					2	2	4	8
8.	Pustakawan					1	2	3	6
9.	Analisis Kebijakan			1	1			1	3
10.	Analisis SDM Aparatur	1		1	3				5
11.	Penata Laksana Barang						2		2
12.	Dokter							1	1
	TOTAL								138

Sumber : Bagian Umum & Kepeg. BPSDM Prov.Sulsel TA. 2021

Gambaran Umum Pegawai berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin pada Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Golongan Pegawai		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
Golongan IV	IV/e	-	5	5
	IV/d	11	-	11
	IV/c	10	1	11
	IV/b	14	6	20
	IV/a	11	8	19
Sub Total		46	20	66
Golongan III	III/d	15	15	30
	III/c	8	9	17
	III/b	3	4	7
	III/a	6	3	9
Sub Total		32	31	63
Golongan II	II/d	3	1	4
	II/c	-	1	1
	II/b	1	2	3
	II/a	1	-	1
Sub Total		5	4	9
Golongan I	I/d	-	-	-
	I/c	-	-	-
	I/b	-	-	-
	I/a	-	-	-
Sub Total		-	-	-
TOTAL		83	55	138

Sumber data : Bagian Umum & Kepeg. BPSDM Prov.Sulsel TA. 2021

Agar dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPSDM Prov. Sulsel. Adapun SOP internal tersebut diharapkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan di Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulsel dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan pola tindakan yang sistematis.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

❖ KAMPUS - I

Dukungan sarana dan prasarana kediklatan berupa tanah dan bangunan yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan adalah seluas 6.480 M² dengan sertifikat No. 55 tanggal 28 September 1987 milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Bangunan di atas tanah tersebut yaitu Bangunan Perkantoran, Aula, Asrama, Ruang Belajar, Ruang Diskusi, Perpustakaan, Kantin, Ruang Studio dan Dapur serta fasilitas olah raga, Ruang Fitnes, Masjid dan tempat parkir.

Asrama yang dipersiapkan pada gedung C Lantai II memiliki kamar 12 buah dengan kapasitas perkamar sebanyak 3 orang dan Lantai III memiliki kamar sebanyak 9 kamar dengan kapasitas 4 orang perkamar sehingga daya tampung keseluruhan sebanyak 72 orang dan Asrama yang disiapkan pada Gedung D Lantai II, III, IV, V memiliki 32 kamar dengan kapasitas 2 orang perkamar sehingga daya tampung keseluruhan sebanyak 64 orang. Sedangkan ruang belajar pada Gedung C sebanyak 3 ruangan dengan kapasitas 40 orang per-ruangan, Aula pada gedung B Lt. II sebanyak 1 ruangan dengan kapasitas 350 orang dan aula gedung D Lt. I

Jika memperhatikan tingkat volume kegiatan penyelenggaraan diklat selama ini dibanding dengan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana kediklatan yang ada sudah cukup terpenuhi sesuai standar yang dipersyaratkan. Hanya saja sebagian besar peralatan kantor yang dimiliki memiliki usia teknis yang cukup lama sehingga diperlukan pemeliharaan atau peremajaan agar dapat dipergunakan secara optimal.

Adapun jumlah dan jenis sarana/prasarana yang dimiliki saat ini dapat diuraikan pada tabel berikut :

1. DAFTAR JUMLAH LUAS AREAL TANAH DAN BANGUNAN

No	Uraian	Luas (M ²)	Lokasi	Ket
1	2	3	4	5
1	Tanah	6,480	Jl. ST Alauddin No. 105 B Makassar	Sertifikat No. 55 tgl 28 Sept 1987 di bangun TA. 1983/1984
2	Bangunan	4.000	- sda -	
3	Non Bangunan/Pelataran	1.500	- sda -	
4	Belum di manfaatkan	695	- sda -	

2. DAFTAR JUMLAH RUANGAN BELAJAR (KELAS/DISKUSI)

No	Uraian Ruangan	Jumlah Ruangan	Ukuran (M ²)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Ruang Kelas Gedung C Lt. I	3 unit	96 66 66	40 30 30	Di bangun TA.1983/1984 Sda Sda
2	Ruang Aula Gedung B Lt. II	1 unit	35 x 25	500	Di Renovasi T.A. 2011
3	Ruang Server Jaringan Data Base / Informasi Gedung B Lt. I	1 unit	2 x 2,5	3	Di Renovasi T.A. 2011
4	Ruang Kelas Gedung D Lt. I	1 unit	6 x 10	100	Di bangun TA. 2005
9	Ruang Perpustakaan Gedung D Lantai I	1 unit	5 x 10	30	Di bangun TA. 2005
10	Ruang Audio Visual (Studio) Gedung E Lantai II	1 unit	7 x 15	30	Di bangung TA. 2009

3. DAFTAR JUMLAH ASRAMA DAN KAPASITAS

No	Uraian/jenis Asrama	Jumlah Kamar/ Buah	Ukuran/ Per kmr (M ²)	Kapasitas/ Per kmr (org)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Lantai II Ged. C	12	12,5	3	36	Baik
	Lantai III Ged. C	9	24,00	4	36	
2	Lantai II – V Gedung D	32	21,78	2	64	Baik
JUMLAH		53	-	-	136	

4. DAFTAR JUMLAH RUANGAN MAKAN / KANTIN

No	Uraian Ruangan	Jumlah Ruangan	Ukuran (M ²)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Ruang Makan Gedung B Lt. I	2 ruangan	6 x 20 m	150 org	Baik
			6 x 10 m	40 org	
2	Ruang Makan Gedung D Lt. I	1 ruangan	9,9 x 5,1 m	50 org	Baik
3	Ruang Binatu/Laundry Badan Diklat Gedung A Lantai I	1 unit	4,5 x 10 m	-	Baik
4	Ruang Kantin Koperasi Badan Diklat Gedung E Lantai I Perpustakaan F	1 unit	6 x 13,20 m	20 org	Baik
5	Ruang Gedung E Badan Diklat Lantai I	1 unit	3,1 x 3,4 m	5 org	Baik

5. DAFTAR JUMLAH RUANGAN BANGUNAN LAINNYA.

No	Uraian Ruangan	Jumlah	Luas per Ruangan	Jumlah Kapasitas	Ket
1	2	3	4	6	7
I.	GEDUNG PERIBADATAN	1 unit	8 x 8	150 org	Th. 2008
II.	GEDUNG PERKANTORAN	1 unit			Dibangun TA. 1983/1984 dan dalam keadaan rusak dan perlu untuk direnovasi
	dengan rincian, sbb :				
	Gedung A Lt. I , II dan III	8 ruangan			

❖ KAMPUS - II

Dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan kediklatan berupa tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan pada Kampus II Ex IPDN secara keseluruhan adalah seluas 10.363 M² sesuai dengan Lampiran Nomor Keputusan Gubernur Sulawesi` Selatan No. 1679/VIII/Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Bangunan di atas tanah tersebut yaitu Bangunan

Perkantoran, Aula, Asrama, Ruang Belajar, Ruang Diskusi, Kantin, Ruang Fitnes, Ruang Karaoke, Dapur serta fasilitas olah raga, Mesjid dan tempat parkir.

Asrama yang dipersiapkan memiliki kamar 24 buah dengan rincian sebagai berikut : Asrama Garuda (Putra) Lantai I sebanyak 2 barak dengan kapasitas tempat tidur masing-masing sebanyak 10 buah dan Lantai II sebanyak 2 barak kamar dengan kapasitas tempat tidur masing-masing 10 buah, sehingga daya tampun untuk Asrama Putra sebanyak 40 orang. Sedangkan Asrama Putri pada Lantai I terdapat 6 Kamar dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 12 orang dan Lantai II terdapat 6 kamar dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 12 orang, sehingga daya tampung untuk asrama Putri sebanyak 24 orang. Asrama untuk Paviliun terbagi 4 unit, masing-masing unit memiliki 3 kamar tidur dengan kapasitas tempat tidur masing-masing 5 buah sehingga daya tampung untuk Pavilun sebanyak 20 orang. Sedangkan ruang belajar terdiri dari : Ruang belajar kepramugarian sebanyak 1 unit dengan kapasitas 40 orang per-ruangan, Ruang Rehat untuk pengajar dan Peserta 1 unit, Aula utama sebanyak 1 unit dengan daya tampung kurang lebih 300 orang, Ruangan belajar/kelas untuk peserta diklat sebanyak 4 unit, ruang Lounge sebanyak 1 unit, Ruang makan sebanyak 1 unit, Masjid, Ruang Binatu/Laundry, Ruang Tamu Pimpinan, selain itu terdapat pula Fasilitas olahraga, Apotek/Klinik (Fisioterapy dan Radiology), Kantin/Warkop, Fasilitas Perbankan yakni Bank SulSelbar, ATM Bank BNI, ATM Bank Mandiri masing-masing 1 unit.

Jika memperhatikan tingkat volume kegiatan penyelenggaraan diklat selama ini dibanding dengan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana kediklatan yang ada sudah cukup terpenuhi sesuai standar yang dipersyaratkan. Hanya saja sebagian besar peralatan kantor yang dimiliki memiliki usia teknis yang cukup lama sehingga diperlukan pemeliharaan atau peremajaan agar dapat dipergunakan secara optimal.

Adapun jumlah dan jenis sarana/prasarana yang dimiliki saat ini dapat diuraikan pada tabel berikut :

1. DAFTAR JUMLAH LUAS AREAL TANAH DAN BANGUNAN

No	Uraian	Luas (M ²)	Lokasi	Ket
1	2	3	4	5
1	Tanah	10.363	Jl. Cendrawasih Kel. Sambung Jawa Makassar	Sertifikat No. 24 tgl 15 Juli 1992
2	Bangunan			
3	Non Bangunan/Pelataran			
4	Belum di manfaatkan			

2. DAFTAR JUMLAH RUANGAN BELAJAR (KELAS/DISKUSI)

No	Uraian Ruangan	Jumlah Ruangan	Ukuran (M ²)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Ruang Kelas / Diskusi / Seminar	6 unit	7 x 8 m 7 x 8 m 7 x 8 m 7 x 6,5 m 7 x 6,5 m 7 x 6,5 m 6 x 8 m		Direnovasi T.A. 2013 Sda Sda
2	Ruang Aula	1 unit	10 x 34	300	Di Renovasi T.A. 2013

3. DAFTAR JUMLAH ASRAMA DAN KAPASITAS

No	Uraian/jenis Asrama	Jumlah Kamar/ Buah	Ukuran/ Per kmr (M ²)	Kapasitas/ Per kmr (org)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Asrama Garuda (Putra)	2 buah				Baik
	Lantai I	2	6 x 10 m	10	20	
	Lantai II	2	6 x 10 m	10	20	
2	Asrama Putri (Depan)	2 buah				Baik
	Lantai I	1	4 x 26 m	11	11	
	Lantai II	1	4 x 26 m	14	14	
3	Asrama Paviliun terdiri dari :					Baik
	1. Paviliun Indira	3	3 x 3,5	2 dan 1	5	Baik
	2. Paviliun	3	3 x 3,5	2 dan 1	5	Baik

2021	Riska	LAPORAN KINERJA			
	3. Paviliun Sofia	INSTANSI PEMERINTAH	3 x 3,5	2 dan 1	5
	4. Radisya	PROVINSI SULAWESI SELATAN	3 x 3,5	2 dan 1	5
	JUMLAH	6 buah	-	65	85

4. DAFTAR JUMLAH RUANGAN MAKAN, KANTIN/WARKOP, SARANA OLAHRAGA/HIBURAN, SARANA KESEHATAN DAN SARANA PERBANKAN

No	Uraian Ruangan	Jumlah Ruangan	Ukuran (M ²)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Ruang Makan Utama (Ayunsri)	2 ruangan	20 x 8 m 14 x 8 m	200 org 80 org	Baik
2	Ruang Kantin/Warkop	1 ruangan	10 x 4 m 4 x 5 m	50 org	
3	Klinik Praja Rindra Care dan Apotek Kimia Farma dengan fasilitas Fisoterapy dan Radiology	1 unit	25 x 8 m		Baik
4	Bank SulSelBar dan Fasilitas ATM Bank BNI dan ATM Bank Mandiri	3 unit	10 x 8 m 3 x 3 m 3 x 3 m		Baik

5. DAFTAR JUMLAH RUANGAN BANGUNAN LAINNYA.

No	Uraian Ruangan	Jumlah	Luas per Ruangan	Jumlah Kapasitas	Ket
1	2	3	4	6	7
I.	GEDUNG PERIBADATAN	1 unit	7 x 25		Th. 2013
II.	GEDUNG PERKANTORAN	1 unit			Direnovasi TA. 2016
	dengan rincian, sbb :				
	- Kepala Badan	1 ruangan	6 x 5		Sda
	- Sekretaris Badan	1 ruangan	6 x 4		Sda
	- Ruang Subag Keuangan	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Staf Keuangan	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Subag Program	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Subag Umum & Kepegawaian	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Staf Subag Umum & Kepegawaian	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Kabid Kepemimpinan	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Staf Kepemimpinan	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Kabid Teknis Fungsional	1 ruangan	5 x 8		Sda

2021	Ruang Staf Bidang Teknis Fungsional	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Kabinet Perencanaan	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Staf Bidang Perencanaan	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Bidang Pengembangan & Inovasi	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Staf Pengembangan & Inovasi	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Widyaiswara	3 ruangan	5 x 8		Sda
	JUMLAH	1 unit / 18 Ruangan			

KAMPUS – III

(RENCANA PENGEMBANGAN COPORATE UNIVERSITY-
CORPU UNTUK ASN PROVIINSI SULAWESI SELATAN)

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berupaya untuk mengembangkan kompetensi, sebagai upaya mengembangkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Dalam Negeri agar lebih profesionaldalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk membangun profesionalitas Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Dalam Negeri maka diperlukan perencanaan relokasi baru gedung kampus yang berlokasi diluar Kota Makassar yang lebih modern dengan luas area yang cukupdan memenuhi syarat sebagai tempat pelatihan. Rencana relokasi baru gedung tersebut mudah - mudahan dapat terealisasi.

Dalam upaya pemerintah provinsi Sulawesi Selatan meningkatkan kinerjanya, maka diperlukan langkah strategik, sistematis dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut diperlukan agar target capaian kinerja pemerintahan yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan dapat dicapai. Kinerja pemerintah provinsi Sulawesi Selatan tersebut tertuang ke dalam sasaran strategik sebagai bagian dari pengejawantahan dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan sasaran pembangunan selama kurun waktu lima tahun (2019-2024).

Indikator Sasaran strategik dinyatakan dicapai berdasarkan indikator utama yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD. Capaian Indikator Kinerja Utama pemerintah tersebut (IKU Gubernur) dapat diukur setiap tahun melalui Indeks Kinerja Pelayanan Publik dan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari akumulasi kinerja OPD.

Selama tiga tahun terakhir misalnya indeks kinerja pelayanan publik yang merupakan tugas utama birokrasi hanya mendapatkan nilai C

{Permenpan-RB No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Demikian juga dengan nilai SAKIP, selama 3 (tiga) tahun terakhir masing-masing pada tahun 2016, berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 16 Februari 2017 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh nilai 58,04 atau predikat "CC (Cukup Memadai)".

Pada tahun 2017, berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 5 Pebruari 2018 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh nilai 62,04 atau predikat "B".

Sedangkan pada tahun 2019, berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2019 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh nilai 70,19 atau predikat "BB".

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun	Nilai Hasil Evaluasi	Tingkat Akuntabilitas Kinerja
2016	58,04	CC
2017	62,04	B
2018	64,28	B
2019	70,13	BB
2020	74,22	BB

Sumber: Data Primer, 2021.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa selama 5 (empat) tahun terakhir indikator kinerja pelayanan publik maupun SAKIP semuanya menunjukkan kinerja yang mulai meningkat secara signifikan, walaupun tingkat

efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah cukup baik namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Kinerja yang rendah dari sebuah organisasi tidak lepas dari kinerja individu Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sebuah pemerintah daerah. Kinerja individu sangat berkorelasi dengan kompetensi ASN. Jika nilai kinerja pemerintah daerah yang merupakan akumulasi dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum mencapai kinerja kategori baik, hal ini berarti kontribusi ASN dalam mendukung capaian kinerja OPD juga belum optimal. Kondisi ini terjadi karena kompetensi para ASN tidak memadai dan bahkan tidak relevan dengan kebutuhan organisasi.

Penyebab kompetensi ASN belum memberi kontribusi nyata bagi OPDnya karena selama ini upaya pengembangan kompetensi yang diberikan kepada ASN belum efektif. Artinya model dan metode pengembangan kompetensi ASN selama ini yang diterapkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan belum tepat sasaran.

Kewenangan pengembangan kompetensi ASN pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Atas dasar itulah maka dirasakan perlu segera membentuk model dan metode baru terkait dengan pengembangan kompetensi ASN yang dinamakan *Corporate University (CORPU)* ASN Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk mengubah model dan metode pengembangan ASN menurut *Corporate University* maka diperlukan pembentukan Peraturan baru berupa Peraturan Gubernur (Pergub) baru. Diharapkan setelah Pergub ditetapkan maka selanjutnya pelaksanaan *Corporate University* memperoleh solusi pembentukannya secara hukum untuk menyelesaikan permasalahan model dan metode pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sehubungan dengan upaya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Aparatur Sipil Negara *Corporate University*, Sasaran yang akan diwujudkan, adalah:

- a) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika ASN sesuai dengan kebutuhan instansi.

- b) Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c) Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun Asas dalam penyelenggaraan ASN Corporate University Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) profesionalitas;
- 3) proporsionalitas
- 4) keterpaduan
- 5) delegasi
- 6) netralitas
- 7) akuntabilitas
- 8) efektif dan efisien
- 9) keterbukaan
- 10) nondiskriminatif
- 11) persatuan dan kesatuan
- 12) keadilan dan kesetaraan
- 13) kesejahteraan

sedangkan Pembentukan ASN Corporate University Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan atas dasar prinsip :

- ✓ nilai dasar
- ✓ kode etik dan kode perilaku
- ✓ komitmen, integritas moral, dan tanggungjawab pada pelayanan publik
- ✓ kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
- ✓ kualifikasi akademik
- ✓ jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
- ✓ professional jabatan

Berkenaan dengan perancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang *ASN Corporate University (Corpu)* Provinsi Sulawesi Selatan, eksistensi naskah akademik yang mengkaji secara mendalam dan komprehensif mengenai teori dan pemikiran ilmiah sehubungan dengan penyelenggaraan *Corporate University (CORPU)* ASN Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan keniscayaan. disebabkan, selain

pengkajian terhadap teori dan pemikiran ilmiah, dalam naskah akademik ditujukan pula terhadap pengajuan argumentasi filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi dasar pengaturan yang nantinya dimuat di dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang *Corporate University (CORPU)* ASN Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan memerhatikan berbagai pengkajian secara ilmiah dan komprehensif atas asas, teori, sistematika, teknik perancangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat melahirkan Peraturan Gubernur tentang *Corporate University (CORPU)* ASN Provinsi Sulawesi Selatan, yang pengaturannya sejalan dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang *Corporate University (CORPU)* ASN Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan memerhatikan berbagai pengkajian secara ilmiah dan komprehensif atas asas, teori, sistematika, teknik perancangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat melahirkan Peraturan Gubernur tentang *Corporate University (CORPU)* ASN Provinsi Sulawesi Selatan, yang pengaturannya sejalan dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang *Corporate University (CORPU)* ASN Provinsi Sulawesi Selatan, pada dasarnya lingkup pengaturannya menjangkau Asas, Fungsi, dan Tujuan, serta Prinsip Penyelenggaraan ASN Corporate University Provinsi Sulawesi Selatan; Organisasi dan Tata Kerja dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi serta Pemantauan dan Evaluasi ; Infrastruktur yang meliputi Infrastruktur Pembelajaran dan system Informasi. Dimana keseluruhan hal-hal tersebut, termuat dalam pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang *Corporate University (CORPU)* ASN Provinsi Sulawesi Selatan.

2.4 Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan

Guna menjamin pemenuhan tingkat kompetensi aparatur yang tersertifikasi baik dari sisi manajemen kediklatan maupun desain pembelajaran, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulawesi Selatan

telah memiliki pengakuan atau akreditasi dari Instansi pembina diklat (LAN – RI). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAN-RI No. 713/K.1/PDP.09/2018 tanggal 19 November 2018 maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prov. Sulawesi Selatan telah terakreditasi untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan Administrasi dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

Dengan demikian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulawesi Selatan sebagai institusi penyelenggara diklat aparatur/PNS berhak memfasilitasi penyelenggara diklat terutama untuk Pemerintah Kab./Kota se Sulawesi Selatan yang institusi penyelenggara diklatnya belum terakreditasi. Dengan status ini hampir semua penyelenggaraan diklat di lingkup Pemerintah Kab./Kota se Sulawesi Selatan telah difasilitasi oleh Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Prov. Sul Sel. Status lembaga terakreditasi ini juga bahkan telah berdampak pada semakin banyaknya jumlah pihak atau mitra kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi SDM terutama pendidikan dan pelatihan, selanjutnya, capaian kinerja pelayanan Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan, dapat juga dilihat berdasarkan indikator-indikator kinerja pada masing-masing program dimana berdasarkan indikator capaian program, kinerja pembangunan dan pelayanan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan periode tahun 2019 yang ditunjukkan dalam bentuk berbagai kegiatan Pelatihan yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2019, baik kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan di Provinsi dengan dana dari APBD Provinsi, APBN dan/atau sumber dana lainnya yang sah maupun kegiatan fasilitasi penyelenggaraan diklat pada Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dengan dana dari APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan tersebut meliputi Pelatihan Kepemimpinan, Pelaksanaan Pelatihan Latsar, Pelaksanaan Pelatihan Revolusi Mental, Pelaksanaan Pelatihan Tekhnis Fungsional dan Pelaksanaan Pelatihan Pemerintahan.

	- Ruang Bidang Pengembangan & Inovasi	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Staf Pengembangan & Inovasi	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Widyaiswara	3 ruangan	5 x 8		Sda
JUMLAH		2 unit / 18Ruangan			

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2018-2023

Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah adalah proses sistematis pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan pengetahuan aspiratif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah sebagai pedoman bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyusun sasaran, program & kegiatan dalam mendukung pembangunan daerah. penyusunan Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah & pembangunan.

1. VISI DAN MISI Provinsi Sulawesi Selatan

RENSTRA OPD merupakan langkah lanjut untuk mendukung pencapaian Visi Provinsi. Visi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 - 2023 adalah **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter.”**

Penjabaran dari visi tersebut adalah :

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan dan potensi yang dihadapi pada periode 2018-2023, arahan dari RPJPD Sulawesi Selatan, serta arahan dari visi RPJMD 2019-2023, visi pembangunan daerah Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah: “ Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter “

Dalam rumusan visi ini ada **5 (Lima) pokok visi** yakni **Inovatif** diindikasikan oleh Kondisi Pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih

dan melayani”, **Produktif** ditandai oleh kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”, **Kompetitif** ditandai oleh kondisi Masyarakat yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas, **Inklusif** ditandai oleh kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”, serta **Berkarakter** ditandai oleh kondisi penyelenggaraan pembangunan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter” .

Misi dalam RPJMD ini dimaksud yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel
3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif
4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan

Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan disusun guna mendukung pencapaian misi pertama Provinsi Sulawesi Selatan 2018 - 2023 yaitu :

1. “Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan Inovasi.”

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dengan cara meningkatkan kualitas birokrasi dengan Meningkatkan kapabilitas kelembagaan dan keunggulan SDM aparatur. Peningkatan kualitas birokrasi

dengan peningkatan keunggulan SDM aparatur sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi menuju good governance.

2. NILAI - NILAI ORGANISASI

Nilai-nilai organisasi yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

- 1) Kerjasama
- 2) Keadilan
- 3) Jujur
- 4) Transparansi
- 5) Kompetensi

3. TUJUAN

Penetapan tujuan dan sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan faktor-faktor prioritas isu-isu strategis. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu oleh Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan maka ditetapkanlah tujuan sebagai berikut:

6. Meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi

4. SASARAN

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, maka sasaran yang diinginkan dari tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi

Untuk maksud tersebut tatanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bertekad mewujudkannya yang dapat dibuktikan melalui pernyataan Visi

yakni **“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”** dan telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Tujuan dan sasaran Badan Pengembangan SDM Prov.Sul-Sel beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran strategis	Indikator Kinerja utama	satuan	Target kinerja tahun ke				
1	2	3	2019	2020	2021	2022	2023
1. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi	Nilai Akreditasi Badan Pengembangan SDM	Klasifikasi	B	BB	BB	A	AA

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2		3	4				
Meningkan Kualitas Pengembangan	Meningkatnya Kualitas layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi	Indeks Kepuasan OPD Terhadap kinerja Alumni Pelatihan	Angka	90	95	96	98	100
		Indeks capaian Profesional ASN (IP ASN) setelah mengikuti diklat	Angka	92	95	96	98	100
		Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi	Persen	95	96	98	98	100
		Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/silabus	Persen	96	97	97	98	100
		Status Akreditasi kelembagaan pelatihan	Nilai	B	BB	A	A	AA
		Status Akreditasi Program Pelatihan	Nilai	B	BB	A	A	AA
		Persentase Jumlah tenaga Pengajar yang sudah mengikuti TOT	Persen	95	96	97	97	100

kompetensi		Persentase jumlah diklat yang dilaksanakan yang berbasis standar kompetensi	Persen	95	96	97	97	100
		Persentase jumlah pelatihan yang memiliki standar hukum	Persen	95	96	97	97	100
	Meningkatnya akutanbilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase nilai SAKIP organisasi perangkat daerah	Nilai	B	BB	A	A	AA
		Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik	Persen	97	98	98	98	100
		Persentase temuan material	Persen	0.75	0.25	0.20	0.10	0.0

5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Strategi

1. Meningkatkan kapabilitas kelembagaan dan keunggulan SDM aparatur

2. Kebijakan

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Berbasis Teknologi Informasi (IT)
2. Peningkatan kapabilitas kelembagaan dan keunggulan SDM aparatur
3. Terlaksananya pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan (manajemen talenta)
4. Tercapainya standar manajemen mutu dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi
5. Peningkatan kualitas SDM Aparatur untuk memenuhi regulasi kediklatan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan beberapa indikator kinerja utama sejak tahun 2018, yang diimplementasikan/dijabarkan ke dalam indikator kinerja kegiatan (Indikator Kinerja Outcome).

Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN
Meningkatnya Kualitas layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi	- Indeks Kepuasan OPD terhadap Kinerja Alumni Pelatihan	Angka	IK OPD= $\frac{\text{Total dari Nilai Oersensi Per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}}$ X Nilai Penimbang $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$
	- Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	Angka	

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan tekat dan janji pimpinan instansi dalam melaksanakan rencana kerja yang telah disusun dimana didalamnya menjanjikan atau menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target/rencana capaiannya serta anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan. Perjanjian kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	2		3	4
Meningkan Kualitas Pengembangan kompetensi	Meningkatnya Kualitas layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi	Indeks Kepuasan OPD Terhadap kinerja Alumni Pelatihan	Angka	96
		Indeks capaian Profesional ASN (IP ASN) setelah mengikuti diklat	Angka	96
		Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi	Persen	98
		Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/silabus	Persen	97
		Status Akreditasi kelembagaan pelatihan	Kategori	A
		Status Akreditasi Program Pelatihan	Kategori	A
		Persentase Jumlah tenaga Pengajar yang sudah mengikuti TOT	Persen	97
		Persentase jumlah diklat yang dilaksanakan yang berbasis standar kompetensi	Persen	97
		Persentase jumlah pelatihan yang memiliki standar hukum	Persen	97
	Meningkatnya akutanbilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	nilai SAKIP organisasi perangkat daerah	Kategori	A
		Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik	Persen	98

		Persentase temuan material	Persen	0.20
--	--	----------------------------	--------	------

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai 2 Sasaran Strategis dalam pelaksanaan tugasannya, ke-dua sasaran tersebut didukung oleh 12 Indikator Kinerja Utama seperti berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2		3	4				
Meningkatkan Kualitas Pengembangan kompetensi	Meningkatnya Kualitas layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi	Indeks Kepuasan OPD Terhadap kinerja Alumni Pelatihan	Angka	90	95	96	98	100
		Indeks capaian Profesional ASN (IP ASN) setelah mengikuti diklat	Angka	92	95	96	98	100
		Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi	Persen	95	96	98	98	100
		Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/silabus	Persen	96	97	97	98	100
		Status Akreditasi kelembagaan pelatihan	Kategori	B	BB	A	A	AA
		Status Akreditasi Program Pelatihan	Kategori	B	BB	A	A	AA
		Persentase Jumlah tenaga Pengajar yang sudah mengikuti TOT	Persen	95	96	97	97	100
		Persentase jumlah diklat yang dilaksanakan yang berbasis standar kompetensi	Persen	95	96	97	97	100
		Persentase jumlah pelatihan yang memiliki standar hukum	Persen	95	96	97	97	100
	Meningkatnya akutanbilas kinerja,	Nilai SAKIP organisasi nilai perangkat daerah	kategori	B	BB	A	A	AA

	perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik	Persen	97	98	98	98	100
		Persentase temuan material	Persen	0.75	0.25	0.20	0.10	0.0

A.2 CAPAIAN KINERJA ATAS IKU

Capaian tahun 2021

Indikator Sasaran	Target	Capaian	Kinerja
Indeks Kepuasan OPD Terhadap kinerja Alumni Pelatihan	96	96	100%
Indeks capaian Profesional ASN (IP ASN) setelah mengikuti diklat	96	96	100%

Realisasi Sasaran 1 :

“Meningkatnya Kualitas layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi . ”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi sebagai berikut :

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Capaian	Kinerja
Indeks Kepuasan OPD Terhadap kinerja Alumni Pelatihan	angka	96	96	100%
Indeks capaian Profesional ASN (IP ASN) setelah mengikuti diklat	angka	96	96	100%
Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi	Persen	98	98	100%
Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/silabus	Persen	97	97	100%
Status Akreditasi kelembagaan pelatihan	Kategori	BB	BB	100%
Status Akreditasi Program Pelatihan	Kategori	BB	BB	100%
Persentase Jumlah tenaga Pengajar yang sudah mengikuti TOT	Persen	97	97	100%

Persentase jumlah diklat yang dilaksanakan yang berbasis standar kompetensi	Persen	97	97	100%
Persentase jumlah pelatihan yang memiliki standar hukum	Persen	97	97	100%

Realisasi Sasaran 2 :

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.”

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Capaian	Kinerja
Nilai SAKIP organisasi nilai perangkat daerah	Kategori	95	95	100%
Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik	Persen	95	95	100%
Persentase temuan material	Persen	96	96	100%

Realisasi anggaran dalam pencapaian Sasaran**A. TARGET PENDAPATAN**

Adapun Target Pendapatan pada DPA Perubahan Tahun 2021 Sebesar **Rp. 643.361.000,-**, berkurang sebesar **Rp. 1.694.200.000,-** atau **72,48%** dari target Pokok sebesar **Rp. 2.337.561.000,-**. Hal ini disebabkan karena adanya pandemic Covid 19, sehingga pelaksanaan Diklat PIM III (PKA) dan Diklat PIM IV (PKP) ditiadakan. Adapun Rincian Penerimaan Retribusi Daerah sampai Desember Tahun 2021 Sebagai Berikut :

No	Rincian Objek Penerimaan	Target Pokok	Target Perubahan	Realisasi	(%)
A	Retribusi Daerah	2.337.561.000,-	643.361.000,-	999.389.000,-	155,34,-
I	Retribusi Jasa Umum	1.694.200.000,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-
a.	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan	1.694.200.000,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-
	- Penyelenggaraan Diklat PIM III	885.000.000,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-
	- Penyelenggaraan	809.200.000,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-

No	Rincian Objek Penerimaan	Target Pokok	Target Perubahan	Realisasi	(%)
	Diklat PIM IV				
II	Retribusi Jasa Usaha	643.361.000,-	643.361.000,-	999.389.000,-	155,34,-
a.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	181.551.000,-	181.551.000,-	181.551.000,-	100.00,-
b.	Retribusi Pemakaian Ruangan	461.810.000,-	461.810.000,-	813.770.000,-	176,21,-

B. ANGGARAN BELANJA

Pada DPA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 BPSDM memperoleh Anggaran Belanja sebesar **Rp. 31.698.085.893,-** berkurang sebesar **Rp. 5.932.045.550,-** atau **15,76%** dari target Pokok sebesar **Rp. 37.630.131.443,-** Hal ini disebabkan karena adanya Refocusing Belanja akibat pengurangan dari belanja DAU dan DBH sebesar 8% yang penggunaan dananya untuk mendukung operasional pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan.

Adapun Realisasi Belanja sebesar **Rp. 30.792.565.149,11** atau **97,14%** dari total alokasi belanja sebesar **Rp. 31.698.085.893,-** dan Terdapat Sisa Anggaran sebesar **Rp. 905.520.743,89,-** Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Belanja Daerah	31.698.085.893,-	30.792.565.149,11,-	905.520.743,89,-	97,14,-	99,66,-
1. Belanja Operasi	30.926.015.366,-	30.107.941.999,11,-	818.073.366,89,-	97,35,-	99,66,-
2. Belanja Modal	772.070.527,-	684.623.150,-	87.447.377,-	88,67,-	100,-

Anggaran Belanja tersebut dialokasikan untuk membiayai **2 (dua) Program** terbagi dalam **9 (Sembilan) Kegiatan** dan **37 (Tiga Puluh Tujuh) Sub Kegiatan** dengan rincian sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Dengan Total Anggaran sebesar Rp. 28.786.090.993,-. dan telah terealisasi sebesar Rp. 28.232.141.810,11,- atau 98,08% dan Fisik (99,63%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 553.947.182,89,- atau 1,92%

Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan 6 (enam) Kegiatan yang terdiri dari :

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 587.169.500,-. dan telah terealisasi sebesar Rp. 524.257.400,- atau 89,29% dan Fisik 100%, Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 62.912.100,- atau 10,71%.

Dimana anggaran tersebut dialokasikan kedalam 6 sub kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 21.677.358.415,-. dan telah terealisasi sebesar Rp. 21.559.190.701,- atau 99,45% dan Fisik 100%, Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 118.167.714,- atau 0,54%.

Dimana anggaran tersebut dialokasikan kedalam 7 sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 479.014.700,-. dan telah terealisasi sebesar Rp. 447.879.700,- atau 93,15% dan Fisik 100%, Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 32.865.000,- atau 6,86%.

Dimana anggaran tersebut dialokasikan kedalam 2 sub kegiatan yaitu :

1. Pendataan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.

4. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 2.044.236.040,-. dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.864.691.856,- atau 91,22% dan Fisik 100%, Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 179.544.184,- atau 8,78%.

Dimana anggaran tersebut dialokasikan kedalam 5 sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Barang dan jasa)
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Fasilitas Kunjungan Tamu
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 825.643.800,-. dan telah terealisasi sebesar Rp. 799.029.913,11,- atau 96,78% dan Fisik 100%, Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 26.613.886,89,- atau 3,22%. Dimana anggaran tersebut dialokasikan kedalam 2 sub kegiatan yaitu :

1. Pengadaan Meubel
2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. **Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 2.343.730.922,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.290.165.164,- atau 97,71% dan Fisik 100%, Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 53.565.758,- atau 2,28%.

Dimana anggaran tersebut dialokasikan kedalam 2 sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 828.072.616,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 747.794.076,- atau 90,31% dan Fisik 100%, Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 80.278.540,- atau 9,69%.

Dimana anggaran tersebut dialokasikan kedalam 6 sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (Belanja Modal)
4. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. Pemeliharaan /Rehabilitas sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dengan Total Anggaran sebesar Rp. 2.911.994.900,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.560.421.339,- atau 87,93% dan Fisik (100%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 351.573.561,- atau 12,07%

Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan 2 (dua) Kegiatan yang terdiri dari :

1. **Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis**, dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 553.921.118,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 484.298.118,- atau 87,43% dan Fisik 100%, Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 69.623.682,- atau 12,56%.

Dimana anggaran tersebut dialokasikan kedalam 2 sub kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

- Pada sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran pelatihan :

- Pelatihan Revolusi Mental **(Refocusing)**
- Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis` **(Refocusing)**
- Pelatihan Pengembangan SAKIP (Telah Dilaksanakan)
- Pelatihan Tata Naskah Dinas dan Legal Drafting **(Refocusing)**
- Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (Telah Dilaksanakan)
- Pelatihan Penilaian Properti Lanjutan Untuk Penilaian BMD **(Refocusing)**
- Pelatihan Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Elektronik (E-Government) **(Refocusing)** Karena belum dapat difasilitasi Pelatihan tatap muka oleh Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dikarenakan situasi Pandemi Covid 19
- Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pemerintahan Bagi Camat **(Refocusing)**

Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

- Pada sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan

2. **Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan**, dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 2.358.073.100,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.076.123.221,- atau 88,04% dan Fisik 100%, Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 281.949.879,- atau 11,95%.

Dimana anggaran tersebut dialokasikan kedalam 5 sub kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional
 - Pada Sub Kegiatan ini terdapat alokasi anggaran Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)

2. Peningkatan Kapasitas SDM ASN Corporate University : Widyaiswara/ Learning Advisor, Pengelola Pelatihan, Tenaga IT, Expert Pool dan Pejabat Fungsional Lainnya.

- Pada sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran :

- Akreditasi Lembaga Pemerintah Daerah
- Peningkatan Kapasitas SDM ASN Corporate University : Widyaiswara/Learning Advisor, Pengelola Pelatihan, Tenaga IT, Expert Pool dan Pejabat Fungsional Lainnya.

3. Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga

- Pada sub Kegiatan ini terdapat alokasi anggaran Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dalam penerapan ASN Corporate University.

4. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

- Pada sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran :

- Pelatihan Dasar (Latsar CPNS).
- Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Blended Learning)
- Bimtek Penyusunan Daftar Usul Penetapan Nilai Kinerja (DUPNK) Arsiparis.
- Pelatihan Kebijakan Merdeka Belajar dan Penyusunan Instrument Berbasis E-Assessment bagi Guru SMA/SMK berbasis blended Learning **(Refocusing)**.
- Pelatihan Management Of Training (MOT) berbasis blended Learning **(Refocusing)**.
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial **(Refocusing)**.

5. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

- Pada Sub Kegiatan ini terdapat anggaran Koordinasi Pelatihan Latsar CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan.

BAB V PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyajikan Rencana Strategik, Rencana Kerja OPD, Rencana Kerja Tahunan dan Pengukuran Kinerja Instansi, baik menggunakan Pengukuran Kinerja Sasaran (PPS) maupun Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH tahun 2020 juga dijelaskan tentang evaluasi kinerja antara lain :

1. Capaian Indikator Tujuan.
2. Capaian Indikator Kinerja Utama.
3. Capaian Kinerja Sasaran.

Capaian indikator sasaran strategis sebanyak 2 (dua) sasaran strategis kesemuanya tercapai dengan kategori **SANGAT TINGGI** (yaitu >95%). Demikian pula untuk capaian indikator kinerja utama (IKU), dimana dari 12 (Dua Belas) indikator semua target di tahun 2021 juga tercapai **SANGAT TINGGI**.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja lebih didominasi faktor eksternal, antara lain berupa ketentuan peraturan per Undang-undangan. Namun demikian telah pula disiapkan strategi pemecahan untuk tahun yang akan datang antara lain dengan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.

Capaian kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp23. 906.041.871- atau 92,41 % Capaian kinerja keuangan secara umum tersebut karena:

- a. Adanya peraturan perundangan yang baru sehingga tidak direalisasikan keuangannya.
- b. Adanya perubahan system dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.

- c. Adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan harga antara standarisasi barang dan jasa dengan harga pasar yang berlaku.
- d. Adanya refocusing anggaran

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sulawesi Selatan

Drs. H. ASRI SAHRUN SAID
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19671203 199403 1 00

